TPPWD LANJUT (S3) • SESI 1

Fiscal Federalism Lanjut, Political Economy, dan Multilevel Spatial Governance

TPPWD Lanjut (S3) • Sesi 1 • Otonomi Daerah & Desentralisasi Fiskal

Dari “mengapa desentralisasi?” menuju “melalui mekanisme apa desain institusi menghasilkan outcome spasial yang berbeda?”

Prof. Dr. Ir. Bambang Juanda, M.S. • IPB University • 2026

Posisi Sesi 1 dalam Empat Pertemuan S3

THEORY

- 1. Teori & insentif: fiscal federalism, political economy, multilevel governance
- 2. Fiscal assignment, equalization, dan territorial equity
- 3. Dana Desa/APBDes, local discretion, dan transformasi perdesaan
- 4. Recentralization, hybrid governance, dan evaluasi empiris

Capaian Pembelajaran Sesi 1

THEORY

- Membedakan first- dan second-generation fiscal federalism
- Menjelaskan subsidiarity, correspondence, spillover, dan economies of scale sebagai problem of scale
- Mendiagnosis mismatch political–administrative–fiscal decentralization
- Menganalisis common-pool problem, soft budget constraint, local capture, dan institutional capacity
- Merumuskan causal mechanism dan researchable questions untuk studi doktoral

Mengapa Disebut Fiscal Federalism “Lanjut”?

THEORY

- Bukan lagi: desentralisasi baik atau buruk
- Tetapi: kapan, melalui mekanisme apa, dan untuk wilayah seperti apa?
- Outcome tidak hanya fiskal: layanan, pertumbuhan, ketimpangan, governance, resilience
- Institusi dan kapasitas mengubah efek desain yang sama
- Spillover membuat efek kebijakan melampaui batas administrasi

Peta Konseptual Sesi: Theory → Mechanism → Institution → Spatial Outcome

THEORY



PERTANYAAN KUNCI **Jangan lompat dari teori ke outcome: mekanisme dan institusi harus terlihat.**

Gunakan alur ini untuk menjaga konsistensi theory–mechanism–evidence.

First- vs Second-Generation Fiscal Federalism

THEORY

Dimensi	Generasi Pertama	Generasi Kedua
Fokus	Efisiensi alokatif & pembagian fungsi	Insentif politik, commitment & governance
Aktor	Pemerintah relatif benevolent	Aktor strategis dengan kepentingan
Mekanisme	Local information, preference matching	Accountability, rent seeking, common pool, bailout
Risiko utama	Spillover & diseconomies of scale	Capture, soft budget constraint, weak institutions
Pertanyaan	Di level mana fungsi paling efisien?	Insentif apa yang diciptakan desain tersebut?

Musgrave: Tiga Fungsi Pemerintah dan Implikasi Desentralisasi

THEORY

Allocation

Paling mungkin didesentralisasi bila manfaat lokal dan spillover kecil

Distribution

Lebih kuat di level nasional karena mobilitas basis pajak & tujuan redistribusi

Stabilization

Dominan nasional karena kebijakan makro dan spillover lintas wilayah

Oates' Decentralization Theorem: Intuisi dan Syarat

THEORY

- Preferensi dan kondisi lokal berbeda
- Tidak ada economies of scale besar yang hilang
- Spillover antaryurisdiksi relatif terbatas
- Pemerintah lokal memiliki informasi lebih baik
- Warga dapat mengawasi keputusan lokal

PERTANYAAN KUNCI **Kapan preferensi lokal cukup kuat untuk mengalahkan economies of scale dan spillover?**

Tiebout Sorting: “Voting with Feet” dan Batas Realitasnya

THEORY

- Mobilitas rumah tangga antarwilayah
- Informasi tentang pajak & layanan tersedia
- Pilihan yurisdiksi cukup banyak
- Tidak ada externality besar
- Tidak ada hambatan serius untuk pindah

Kapan First-Generation Logic Bisa Gagal?

THEORY

Spillover tinggi

Manfaat/biaya melintasi batas daerah

Scale economies tinggi

Unit kecil menjadi terlalu mahal

Capacity rendah

Informasi ada, tetapi kemampuan implementasi lemah

Accountability lemah

Kedekatan tidak otomatis berarti responsif

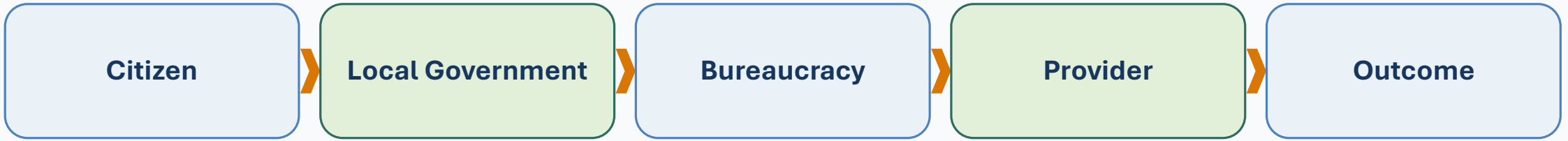
Second-Generation Fiscal Federalism: Fokus pada Insentif

INSTITUTIONS

- Siapa mendapatkan manfaat?
- Siapa menanggung biaya?
- Siapa mengendalikan informasi?
- Siapa dapat menghukum atau memberi reward?
- Apa ekspektasi bailout atau intervensi pusat?

Accountability Chain: Dari Warga ke Outcome

INSTITUTIONS



Gunakan alur ini untuk menjaga konsistensi theory–mechanism–evidence.

Common-Pool Problem

INSTITUTIONS

Local Benefit ↑ while Cost is Shared Nationally → Spending Demand ↑

- Manfaat terkonsentrasi di satu daerah
- Biaya tersebar ke basis pajak nasional
- Insentif meminta transfer/proyek meningkat
- Konsolidasi fiskal menjadi lebih sulit

Soft Budget Constraint dan Ekspektasi Bailout

INSTITUTIONS

- Daerah percaya kekurangan akhirnya ditutup pihak lain
- Kewajiban/defisit tidak sepenuhnya diinternalisasi
- Risiko over-borrowing atau belanja tidak efisien
- Hard budget constraint harus kredibel

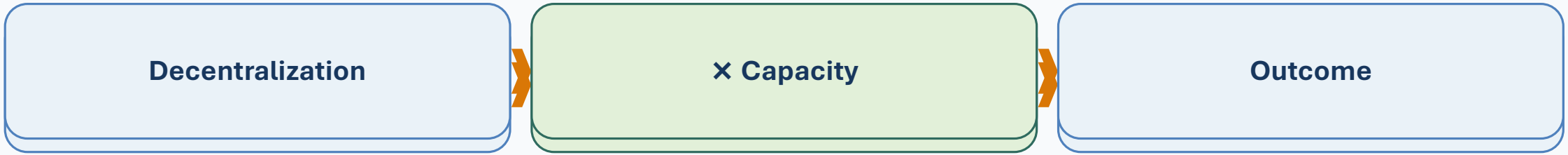
Local Capture dan Elite Capture

INSTITUTIONS

- Kedekatan dengan warga dapat memperkuat accountability
- Tetapi elite lokal juga lebih dekat ke proses keputusan
- Partisipasi formal tidak selalu berarti inklusi substantif
- Media, data, kompetisi politik, dan civil society menjadi moderator

Institutional Capacity sebagai Moderator

INSTITUTIONS

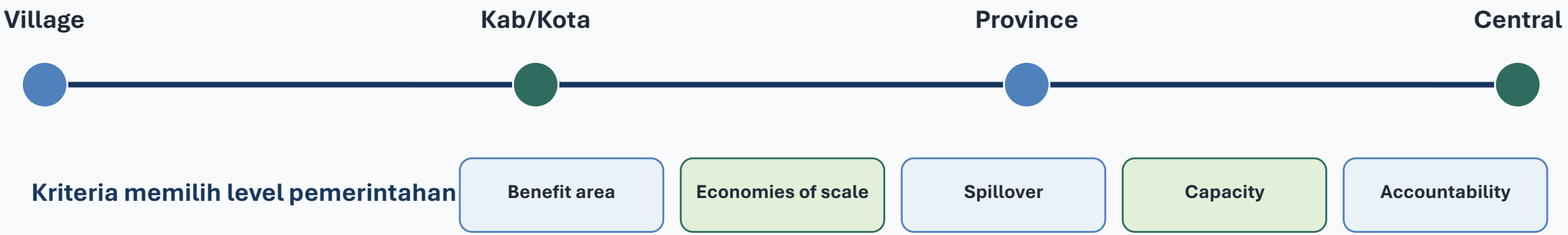


- Kualitas SDM & organisasi
- Data dan digital systems
- Procurement & project management
- Fiscal management
- Leadership & coordination

Gunakan alur ini untuk menjaga konsistensi theory–mechanism–evidence.

Subsidiarity sebagai Problem of Scale

INSTITUTIONS



Correspondence Principle dan Spillover

INSTITUTIONS

- Benefit area ≈ financing area ≈ accountability area
- Jika benefit area lebih luas → koordinasi/transfer/level lebih tinggi
- Jika financing area terlalu luas → accountability lokal dapat melemah
- Jika jurisdiction terlalu kecil → under-provision terhadap spillover

Political–Administrative–Fiscal Decentralization: Tiga Dimensi

INSTITUTIONS

Dimensi	Pertanyaan
Political	Siapa dipilih dan siapa menentukan prioritas?
Administrative	Siapa mengelola organisasi, SDM, dan implementasi?
Fiscal	Siapa membiayai dan memiliki diskresi anggaran?

Mismatch antar-Dimensi: Empat Pola Masalah

INSTITUTIONS

Tanggung jawab tinggi, dana rendah

Underfunded decentralization

Dana tinggi, kapasitas rendah

Absorptive/quality problem

Diskresi tinggi, accountability rendah

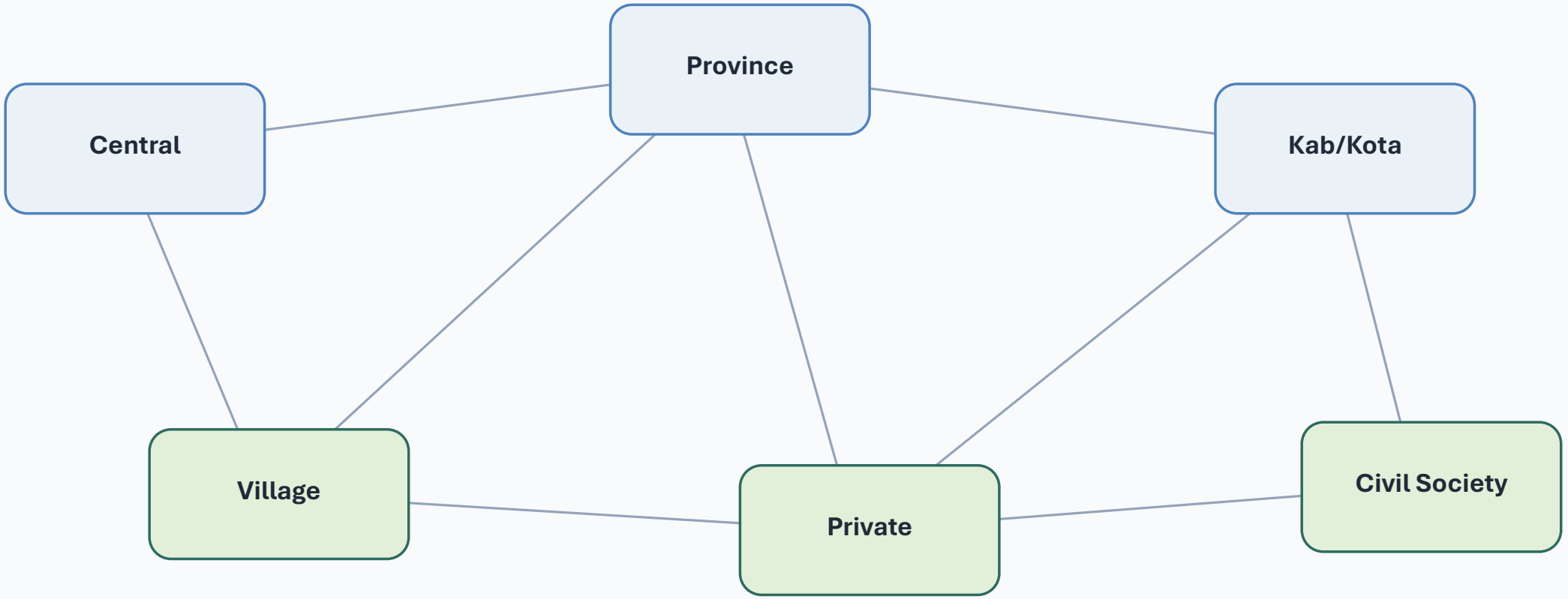
Capture risk

Standar pusat + implementasi lokal tanpa koordinasi

Fragmented governance

Multilevel Governance: Bukan Hierarki Tunggal

INSTITUTIONS



Koordinasi vertikal dan horizontal sama-sama menentukan outcome.

Polycentric Governance: Banyak Pusat Keputusan, Satu Masalah

INSTITUTIONS

- Multiple decision centers
- Overlapping jurisdictions
- Competition + cooperation
- Mutual adjustment
- Learning across jurisdictions

Asymmetric Decentralization: One Size Does Not Fit All

INSTITUTIONS

- Perbedaan geografi & biaya layanan
- Perbedaan kapasitas institusi
- Kekhususan historis/politik
- Spillover dan skala ekonomi berbeda
- Need for differentiated assignment

PERTANYAAN KUNCI **Asimetri yang baik berbasis institutional fit; asimetri yang buruk hanya bargaining privilege.**

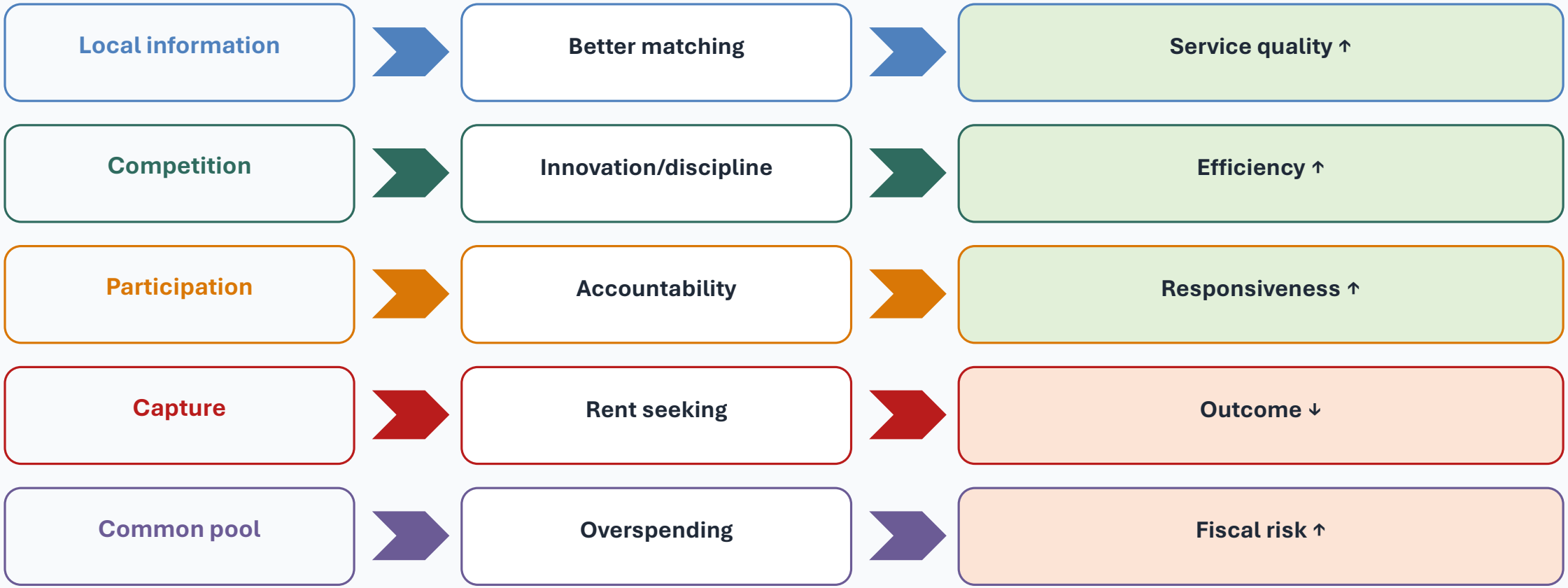
Planning Theory Bridge: Rational vs Collaborative/Advocacy Planning

INSTITUTIONS

Rational/Technocratic	Collaborative/Advocacy
Data, formula, optimum	Deliberation, voice, negotiation
Standardization	Context sensitivity
Expert-led	Multi-actor
Risk: technocratic blindness	Risk: capture/unequal voice

Causal Mechanisms: Desentralisasi → Outcome

RESEARCH



Proposisi/Hipotesis untuk Riset Doktoral

RESEARCH

- H1: Efek desentralisasi positif ketika institutional capacity tinggi
- H2: Spillover tinggi melemahkan manfaat decentralization theorem
- H3: Political competition memperkuat accountability effect
- H4: Transfer dependency memperbesar common-pool incentives bila formula lemah
- H5: Asymmetric assignment lebih efektif bila sesuai cost/benefit geography

Masalah Identifikasi Empiris yang Harus Diantisipasi

RESEARCH

- Reverse causality
- Omitted institutional variables
- Policy endogeneity / non-random assignment
- Spatial spillovers
- Heterogeneous treatment effects
- Measurement error pada fiscal decentralization & capacity

PERTANYAAN KUNCI **Koefisien bukan bukti kausal bila treatment, counterfactual, dan spillover tidak terdefinisi.**

Metode yang Cocok dengan Pertanyaan—Bukan Sebaliknya

RESEARCH

Comparative Institutional Analysis

Untuk memahami variasi aturan dan mekanisme

Process Tracing

Untuk menguji urutan mekanisme dalam kasus

Multilevel Models

Untuk struktur data individu/desa/daerah

Institutional Indices

Untuk mengukur capacity, accountability, atau quality

Spatial Models

Untuk spillover lintas wilayah

Case Lab: Menentukan Level Pemerintahan

RESEARCH

Fungsi	Benefit Area	Scale	Spillover	Capacity Need	Level Awal
Jalan lingkungan	Lokal	Rendah	Rendah	Sedang	?
RS rujukan regional	Regional	Tinggi	Tinggi	Tinggi	?
Pengendalian DAS	Lintas daerah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	?
Pendidikan dasar	Lokal + standar nasional	Sedang	Sedang	Sedang	?
Transportasi metropolitan	Metro	Tinggi	Tinggi	Tinggi	?

Tugas: tentukan level pemerintahan + mekanisme koordinasi bila satu level tidak cukup.

Debate Prompt: Desentralisasi atau Recentralisasi?

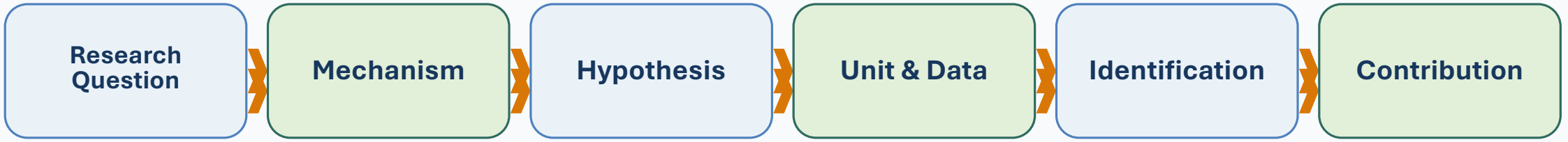
SYNTHESIS

““Masalah utama bukan pusat versus daerah, tetapi apakah assignment, financing, information, dan accountability konsisten.””

- Kapan standardization perlu?
- Kapan local discretion penting?
- Kapan pusat boleh mengambil alih implementasi?
- Bagaimana membedakan capacity problem dari design problem?

Doctoral Research Clinic: Dari Isu ke Desain Riset

SYNTHESIS



PERTANYAAN KUNCI **Apakah contribution Anda datang dari teori, data, identification, heterogeneity, atau desain kebijakan?**

Gunakan alur ini untuk menjaga konsistensi theory–mechanism–evidence.

Contoh Pertanyaan Riset yang Lebih Tajam

SYNTHESIS

- Apakah manfaat fiscal decentralization baru muncul setelah kapasitas institusi melewati threshold tertentu?
- Apakah spillover antardaerah mengurangi efektivitas belanja lokal untuk layanan regional?
- Apakah political competition memperkuat hubungan local discretion dan service quality?
- Apakah asymmetric decentralization mempercepat convergence atau justru memperlebar bargaining gap?
- Apakah partisipasi lokal mengurangi elite capture pada daerah dengan media/civil society yang kuat?

Ringkasan Sesi 1

SYNTHESIS

- First generation: efficiency, preference matching, information
- Second generation: incentives, accountability, capture, commitment
- Subsidiarity = problem of scale, bukan slogan
- Desentralisasi memiliki dimensi political–administrative–fiscal
- Institutional capacity dan spillover menentukan heterogeneity
- Riset S3 harus menjelaskan mechanism dan identification

Preview Sesi 2 — Fiscal Assignment, Equalization, dan Territorial Equity

SYNTHESIS

- Bagaimana mendefinisikan fiscal need?
- Bagaimana mengukur fiscal capacity tanpa memberi reward pada inefisiensi?
- DAU: equalize capacity atau outcome?
- DAK: national priority vs local information
- DBH & Otsus: origin, compensation, equity
- Spatial incidence & underfunded decentralization

Referensi Utama

SYNTHESIS

- Musgrave, R.A. (1959). The Theory of Public Finance.
- Tiebout, C.M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures.
- Oates, W.E. (1972). Fiscal Federalism; Oates (1999). An Essay on Fiscal Federalism.
- Weingast, B.R.; Qian & Weingast — second-generation fiscal federalism / market-preserving federalism.
- Ostrom, E. — polycentric governance and collective action.
- Faguet, J.-P.; Rodríguez-Pose, A.; Smoke, P.; Shah, A.; Bird, R.M. — decentralization, institutions, regional development.
- Indonesia: UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU 1/2022 tentang HKPD.